



P E N E T A P A N
NOMOR 109/Pdt.P/2015/PN.Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

POLICARPUS HORAK ;Lahir di Beitahu, 01 Juli 1954, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 001/RW 001, Dusun Beitahu, Desa. Bebulu Selatan, Kec. Kobalima, Kabupaten Malaka. Sebagai : Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

telah memeriksa berkas perkara ;

telah mendengar Pemohon;

telah memperhatikan bukti – bukti surat dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara No. 109/Pdt.P/2014/PN.Atb. tanggal 19 Januari 2015, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 23 Agustus 1995, telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katholik di Gereja Kristus Raja Seon di Seon , dengan istri Pemohon yang bernama Wihelmina Rafu, namun perkawinan Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
2. Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelayanan hukum. Namun demikian, hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs Mahkamah Agung yang bersangkutan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Atriana Lotu , anak Perempuan, lahir di Beitahu, 05 Agustus 2003 ;

3. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka ;

Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah ranya Pengadilan Negeri Klas IB Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara POLICARPUS HORAK dengan WIHELMINA RAFU yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 23 Agustus 1995 adalah sah ;
- Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai Pencatat Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akta Perkawinan dalam tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan tersebut ;

Menyatakan hukum bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan pemohon telah lahir anak-anak bernama :

1. Corina Lotu, anak Perempuan, lahir di Beitahu, 27 Oktober 1994 ;
2. Noviana Soi, anak Perempuan, lahir di Beitahu, 23 Nopember 1998 ;
3. Theofilus Berek, anak Laki-Laki, lahir di Beitahu, 01 Juli 2001 ;
4. Atriana Lotu , anak Perempuan, lahir di Beitahu, 05 Agustus 2003 ;

Membebaskan biaya perkara Kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk

ion datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-394 3348 (ext.3144)

acakan permohonan permohonan dan terhadap pembacaan surat



Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perkawinan antara Policarpus Horak dengan Wihelmina Rafu yang dikeluarkan oleh Gereja kristus Raja Seon , pada tanggal 04 Pebruari 2014, bertanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Policarpus Horak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 04 Desember 2012, bertanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Policarpus Horak, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kab. Belu, tertanggal 17 September 2012, bertanda P.3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Wihelmina Rafu, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kab. Belu, tertanggal 18 September 2012, bertanda P.4;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang di ajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 29 Desember 2014 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal, 23 Agustus 1995, telah melangsungkan



perkawinan menurut tata cara agama Katholik di Gereja Kristus Raja Seon di Seon , dengan istri Pemohon yang bernama Wihelmina Rafu, namun perkawinan Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Pencatatan Kabupaten Belu ;

Bahwa selama Perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

1. Corina Lotu, anak Perempuan, lahir di Beitahu, 27 Oktober 1994 ;
2. Noviana Soi, anak Perempuan, lahir di Beitahu, 23 Nopember 1998 ;
3. Theofilus Berek, anak Laki-Laki, lahir di Beitahu, 01 Juli 2001 ;
4. Atriana Lotu , anak Perempuan, lahir di Beitahu, 05 Agustus 2003 ;

Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Malaka ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka nohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan nohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Foto copy Surat Perkawinan ara Policarpus Horak dengan Wihelmina Rafu yang dikeluarkan oleh Gereja us Raja Seon , pada tanggal 04 Pebruari 2014, ternyata bahwa antara Pemohon istrinya telah menikah secara Agama Katholik;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti P.1 tersebut Pemohon telah aksanakan perkawinan dengan isterinya, maka perkawinan pemohon tersebut memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ing Perkawinan yang menentukan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan urut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-
ing Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa tiap-tiap



Menimbang, bahwa Pemohon belum mendaftarkan perkawinannya menurut ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut di atas ternyata Perkawinan pemohon telah melampaui batas waktu pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Policarpus Horak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, ternyata pemohon telah melengkapi data keluarganya dengan Kartu Keluarga sesuai Maksud Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dari bukti tersebut tercatat bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga sedangkan Wihelmina Rafu adalah istrinya, dan tercatat juga data anak-anak yaitu Corina Lotu, anak Perempuan, lahir di Beitahu, 27 Oktober 1994 ;Noviana Soi, anak Perempuan, lahir di Beitahu, 23 Nopember 1998 ;Theofilus Berek, anak Laki-Laki, lahir di Beitahu, 01 Juli 2001 dan Atriana Lotu , anak Perempuan, lahir di Beitahu, 05 Agustus 2003 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan atas nama Policarpus Horak dan bukti P.4

Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan atas nama



melengkapi diri mereka dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai maksud Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa dari bukti Kartu Tanda Penduduk dan dari Kartu Keluarga tersebut Pemohon dan istrinya telah tercatat pada alamat yang sama, sehingga dari dokumen administrasi kependudukan tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon dan isterinya telah hidup sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan isterinya telah hidup sebagai suatu keluarga yang utuh dan mereka telah mempunyai keturunan maka hak-hak asasi mereka harus pula dilindungi sebagai penjawatan maksud pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum mencatatkan perkawinan menurut maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Permohonan Pemohon yang meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada Tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut, beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasar pada setiap permohonan informasi pada putusan akta sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik transparansi, keterbukaan dan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat Undang-Undang Pasal 2 UUD Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan
as Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-
sal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara POLICARPUS HORAK dengan WIHELMINA RAFU pada tanggal 23 Agustus 1995 adalah sah ;
- Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka setelah ditunjukan turunan resmi penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register yang di peruntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
- Menyatakan bahwa anak yang di lahirkan dalam Perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon yang di beri nama Corina Lotu, anak Perempuan, lahir di Beitahu, 27 Oktober 1994 ;Noviana Soi, anak Perempuan, lahir di Beitahu, 23 Nopember 1998 ;Theofilus Berek, anak Laki-Laki, lahir di Beitahu, 01 Juli 2001 dan Atriana Lotu , anak Perempuan, lahir di Beitahu, 05 Agustus 2003 adalah sah.
- Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada Hari ini Jumat tanggal 23 Januari 2015 oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu menyediakan informasi paling akurat dan berkualitas bagi bentuk komunikasi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat kemungkinan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu FIDELIS NAHAK sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti


FIDELIS NAHAK



Hakim


NITHANEL N. NDAUMANU, SH.

biaya-biaya :

endaftaran Rp. 30.000,-
anggulan Rp. 70.000,-
aya proses Rp. 50.000,- +
umlah Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)